



Artikel

Rivalitas Politik: Politisasi Etnis dalam Pilkada Boven Digoel

Damiatus Kayatu ^{1,*}

^{1*} Program Studi Ilmu Pemerintahan Stisipol Yaleka Maro Merauke, Indonesia; thekatayumygood@yahoo.com

Abstract: Penelitian ini mendeskripsikan proses politisasi etnis dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Boven Digoel. Keanekaragaman etnis budaya maupun adat istiadat di Boven Digoel, selain sebagai ikatan-ikatan sosial, etnis juga dimobilisasi digunakan sebagai kekuatan politik dalam arena perebutan kekuasaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan beberapa responden, yaitu masyarakat, tokoh masyarakat agama, adat dan elit-elit politik. Observasi dilakukan juga untuk melihat fenomena yang terjadi di kabupaten Boven Digoel. Selain data wawancara dan observasi, juga data nama-nama pejabat eselon II dan III yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Boven Digoel. Hasil penelitian ditemukan bahwa niat awal pemekaran Boven Digoel untuk kesejahteraan masyarakat. Kesiapan sumber daya yang tersedia baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah. Fenomena yang terjadi adalah perebutan sumber-sumber kekuasaan oleh elit-elit lokal tak terelakan. Potensi kelompok-kelompok etnis tidak dikelola untuk mendukung proses pembangunan, tetapi dimobilisasi demi kepentingan elit-elit lokal, sehingga menimbulkan sentimen etnis. Elit-elit Muyu maupun Wambon menggunakan simbol-simbol etnis sebagai kekuatan politik dalam arena perebutan kekuasaan di kabupaten Boven Digoel sehingga rivalitas antar elit-elit Muyu dan Wambon yang terjadi di kabupaten Boven Digoel, tidak hanya perebutan kekuasaan semata, tetapi merupakan persaingan identitas antara Muyu dan Wambon

Keywords: Mobilisasi; Politisasi; etnis; Politik Lokal; Boven Digoel: Pemilihan kepala daerah

Abstract: *This study describes the process of ethnic politicization in the regional head election in Boven Digoel Regency. The diversity of ethnic cultures and customs in Boven Digoel, apart from being social ties, is also mobilized to be used as a political force in the arena of power struggles. This research use descriptive qualitative approach. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews with several respondents, namely the community, religious community leaders, customs and political elites. Observations were also made to see the phenomena that occurred in the district of Boven Digoel. In addition to interview and observation data, data on the names of echelon II and III officials were also obtained from the Regional Personnel Agency of Boven Digoel district. The results of the study found that the initial intention of the expansion of Boven Digoel was for the welfare of the community. The readiness of available resources, both human resources and natural resources, can contribute to regional progress. The phenomenon that occurs is that the struggle for sources of power by local elites is inevitable. The potential of ethnic groups is not managed to support the development process, but is mobilized for the interests of local elites, thus creating ethnic sentiments. The Muyu and Wambon elites use ethnic symbols as political power in the power struggle arena in Boven Digoel district so that the rivalry between Muyu and Wambon elites that occurs in Boven Digoel district is not only a power struggle, but is an identity competition between Muyu and Wambon.*

Keywords: *Mobilization; Politicization; ethnicity; Local Politics; Boven Digoel: Regional head election*

Rivalitas Politik: Politisasi Etnis dalam Pilkada Boven Digoel

1. Pendahuluan

Liberalisasi politik yang terjadi di Indonesia merupakan awal kebangkitan masyarakat lokal dalam menentukan pilihan-pilihan politik. Termasuk pilihan yang dipergunakan sebagai sarana dalam perebutan kekuasaan, baik secara kelembagaan yang bersifat formal maupun non formal termasuk di dalam kelompok-kelompok yang berbasis identitas (etnis, perempuan, agama dan teritorial). Dalam konteks masyarakat lokal, sentimen kedaerahan menjadi faktor dominan dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, yang mana di dalamnya muncul sentimen-sentimen kedaerahan yang berbasis identitas etnisitas (Adam et al., 2019; Ronaldo & Darmaiza, 2021). Sentimen-sentimen etnis tersebut kemudian menjelma menjadi bagian dari kekuatan politik. Kelompok etnis tidak dipandang sebagai fenomena sosial semata, tetapi kerap kali dimobilisasi sebagai kekuatan politik dalam arena perebutan kekuasaan. Praktis, di mana sentimen etnis, *primordialisme* dan ikatan-ikatan kolektivitas menjadi kekuatan politik dalam perebutan kekuasaan (Muhtadi, 2018; Siregar et al., 2021). Secara gamblang Eka Suai (2002) menjelaskan kelompok-kelompok identitas dimobilisasi dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum secara nasional, baik eksekutif maupun legislatif. Ia mengatakan “Jika pada awalnya etnis adalah sebagai fakta yang statis tetapi oleh elit politik berubah sebagai salah satu energi politik dan secara kolektif dilakukan untuk memobilisasi massa.”.

Dalam perpolitikan Indonesia, baik di tingkat pusat maupun lokal, acap kali terjadi manipulasi dan mobilisasi terhadap etnis-ethnic tertentu. Karena adanya persamaan identitas seperti, bahasa, agama, ras, asal-usul sejarah, adanya jalinan emosional, batas-batas teritorial bahkan ideologi yang dimiliki dan berbagai macam kebiasaannya sesuai dengan asal-muasal daerahnya. (Snanf et al., 2018) Artinya bahwa kelompok-kelompok etnis selalu dipergunakan sebagai kekuatan-kekuatan politik oleh para elit dalam perebutan kekuasaan. Argumen di atas memberikan batasan tentang sentimen-sentimen kesukuan tidak hanya dipandang sebagai sarana-sarana sosial semata tetapi juga sentimen-sentimen kesukuan tersebut hadir sebagai sarana kekuatan politik dalam arena perebutan kekuasaan. Tujuannya sangat jelas, selain perebutan kekuasaan, juga sebagai ajang mengukuhkan identitas atau eksistensi etnis yang dominan dan superior, sehingga persaingan-persaingan antar etnis untuk perebutan kekuasaan dalam dinamika politik lokal tak dapat dihindari (Simamora & Rahardjo, 2019; Pamungkas, 2014).

Arena politisasi etnis di kabupaten Boven Digoel terjadi pasca pemekaran daerah. Dinamika politisasi tersebut diwarnai oleh persaingan dua etnis besar yang dominan yaitu Muyu dan Wambon. Secara kuantitas jumlah penduduk etnis Muyu tidak sebanding dengan etnis Wambon, tetapi secara politik, pada saat awal pemekaran daerah, elit-elit Muyu mendominasi birokrasi di kabupaten Boven Digoel. Sementara etnis Wambon yang secara teritorial mempunyai wilayah yang dijadikan ibu kota kabupaten, elit-elitnya tidak mendapat akses pada posisi-posisi strategis dalam jajaran birokrasi pada saat itu. Fenomena tersebut disebabkan oleh dua hal, pertama, dominasi elit-elit Muyu sehingga tidak memberikan akses kepada elit-elit Wambon sendiri. Kedua, ketidakmampuan elit-elit Wambon sendiri untuk mengakses sumber-sumber yang tersedia pada saat itu. Sehingga isu dominasi dan ketidakmampuan etnis tersebut telah menimbulkan sikap antipati dan kebencian pada elit-elit Wambon terhadap elit-elit Muyu.

Proses-proses politisasi yang dilakukan oleh elit-elit Muyu maupun Wambon adalah dengan membangun isu dan menggunakan sarana-sarana yang tersedia sebagai mesin politik. “Dominasi etnis Muyu dan ketidakmampuan etnis Wambon” telah menjadi isu sentral yang mencuat dalam persaingan perebutan sumber-sumber kekuasaan (politik dan ekonomi) di kabupaten Boven Digoel. Dominasi elit-elit Muyu pada saat mereka masih berada di kabupaten Merauke dikhawatirkan akan terjadi pula di kabupaten Boven Digoel. Kekhawatiran bagi elit-elit Wambon sangat beralasan karena pada saat pengisian jabatan-jabatan birokrasi oleh pejabat bupati di awal pemekaran dipandang sangat diskriminatif. Tidak ada elit-elit Wambon yang dilibatkan dalam pengisian jabatan-jabatan birokrasi sebagai representasi dan penghormatan kepada etnis Wambon. Tidak terjadi sharing power diantar para elit-elit lokal sebagai representasi dari etnis Wambon, Awuyu, Kombai dan Koroway. Kepincangan itu telah melahirkan kecemburuan sosial antar etnis,

Rivalitas Politik: Politisasi Etnis dalam Pilkada Boven Digoel

timbulnya sikap antipati dan ketidakpercayaan antar etnis Muyu dan Wambon semakin menguat. Relasi sosial dan penghargaan terhadap norma-norma adat pun menjadi lemah.

Selain isu dominasi terhadap sumber-sumber ekonomi, birokrasi, politik dan budaya dijadikan sebagai komoditas politik elit-elit Wambon. Issu Papua Merdeka menjadi trend tersendiri, etnis Muyu dilabeli dengan OPM (Organisasi Papua Merdeka, karena peristiwa pengungsian tahun 1984-1985. Pada peristiwa pengungsian itu terjadi ± 6000 orang keluar dari daerah Muyu dan mengungsi ke PNG, yang secara geografis berbatasan langsung dengan wilayah populasi etnis Muyu. Sementara SORANDA dengan basis pergerakannya di wilayah Wambon disinyalir digunakan sebagai kekuatan politik. Organisasi ini awalnya adalah sebuah bentukan elit-elit Papua Merdeka yang kalah bersaing dalam perebutan kepemimpinan dalam kubu OPM di wilayah perbatasan RI-PNG. Sisi lain gerakan Wambon Bersatu (WAMBERS) adalah bagian dari upaya memobilisasi etnis Wambon untuk perebutan kekuasaan di kabupaten Boven Digoel dengan menggunakan sarana dewan adat suku Wambon (DAS)

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, karena dalam penelitian ini melihat bentuk politisasi etnis. Indikator tersebut merupakan bagian dari fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian peneliti memberikan kepastian bahwa kasus yang menjadi fokus dalam penelitian ini benar-benar sedang terjadi di kabupaten Boven Digoel. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Sugiyono, 2016). Penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Kabupaten Boven Digoel. Penelitian ini dilakukan di distrik Mandobo sebagai pusat kabupaten dan juga merupakan wilayah adat etnis Wambon, serta distrik Mindiptana sebagai basis wilayah adat etnis Muyu. Dalam kaitannya dengan sumber data tersebut, maka dapat dipilih menjadi dua jenis data yaitu: data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya berupa data-data dan tindakan dari responden yang diwawancara, antara lain terdiri dari kelompok masyarakat di tingkat bawah yaitu etnis Muyu, Wambon, maupun etnis Awuyu. Elit-elit lokal dari etnis Muyu dan Wambon serta elit-elit lokal dari etnis lain, misalnya tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dari etnis Awuyu, Biak dan Serui. Dan elit-elit politik, para anggota dewan, dan para beberapa birokrat di kabupaten Boven Digoel. Sementara data sekunder, yaitu data tertulis atau informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya berupa dokumen-dokumen, misalnya pejabat Eselon II dan III diperoleh dari Kantor Bandan Kepegawaian Daerah kabupaten Boven Digoel.

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang relevan dalam penelitian ini yaitu: *In-depth interview* (wawancara mendalam), yaitu wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada responden yakni kelompok-kelompok etnis dan elit-elit lokal, juga dilakukan *focus group discusion* (FGD) dengan masyarakat. Selain itu juga penulis melakukan observasi langsung terhadap fenomena yang terjadi di lokasi penelitian, dan telaah Pustaka (Ansori & Iswanti, 2020). Studi kepustakaan yaitu suatu telaahan atas teori dan konsep yang berhubungan dengan politisasi etnis. Dalam menganalisa data dipergunakan teknik analisa deskriptif kualitatif, yakni analisis yang dilakukan melalui pemikiran logis dan sistemis. Maka tahapan dalam analisa data dimulai dengan mereduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, dapat dirumuskan pernyataan-pernyataan singkat yang merupakan hubungan antara data yang telah diolah dengan teori sebagai suatu kesimpulan yang merupakan sintesis, yang mengandung jawaban terhadap permasalahan penelitian

Rivalitas Politik: Politisasi Etnis dalam Pilkada Boven Digoel

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pemekaran Kabupaten Boven Digoel: Kesejahteraan dan Rivalitas Etnis

3.1.1. Peningkatan Kesejahteraan

Usulan pemekaran daerah di selatan Papua tidak bisa dilepaskan dari *grand design* yang telah dilakukan oleh pemerintahan Belanda pada masa lalu. Daerah di selatan Papua telah dibagi ke dalam 5 (lima) kelompok daerah besar (*Onderafdeeling*): yaitu, *Onderafdeeling* Mappi beribukota di Kepi. *Onderafdeeling* Asmat dengan ibu kota di Agats, *Onderafdeeling* Boven Digoel dengan ibu kotanya Tanah Merah, *Onderafdeeling* Muyu beribukota di Mindiptana. Dan *onderafdeeling* Merauke dengan ibu kota di Merauke, sekaligus sebagai ibu kota Residen. Kabupaten Boven Digoel kemudian dimekarkan berdasarkan pembagian daerah *onderafdeeling*, yang mana *onderafdeeling* Boven Digoel dan *onderafdeeling* Muyu digabungkan dengan ibu kota di Tanah Merah (Handoko, 2016).

Pemekaran Kabupaten Boven Digoel didasarkan pada UU Nomor 26 Tahun 2002, tentunya mempunyai tujuan, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka daerah terisolir. Pemekaran kabupaten Boven Digoel didasarkan pada beberapa pertimbangan, *pertama*, Boven Digoel merupakan daerah perbatasan RI-PNG, yang kemudian harus dikelola menjadi pintu depan NKRI. *Kedua*, sebagai prasyarat terbentuknya propinsi Papua Selatan. Salah satu syarat pembentukan propinsi ialah terdapat paling kurang 5 (lima) kabupaten, dan *ketiga*, memberikan ruang bagi pengembangan karier birokrat dalam struktur birokrasi pemerintahan. Sisi lain tujuan pemekaran wilayah di Papua adalah demi efisiensi, efektivitas dalam peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Cerita pembuangan tokoh-tokoh politik Indonesia oleh Belanda di Boven Digoel memberikan pandangan bahwa daerah ini merupakan daerah terisolir yang susah dijangkau. Banyak suku-suku terasing yang tersebar di daerah-daerah pedalaman yang selama itu belum dijangkau oleh pemerintah. Masyarakat tidak banyak yang mendapatkan akses tentang pembangunan, baik itu di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Perhatian pemerintah pusat hanya pada momen-momen tertentu, misalnya jika ada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh OPM, itu pun bersifat temporer dengan pendekatan militer. Analisa penulis, bahwa pendekatan model ini ibarat "*kebijakan pemadam kebakaran*." Model ini sering menimbulkan daftar panjang masalah dan tidak pernah ada sebuah solusi yang baik. Konsep pendekatan militer dalam pembangunan di Boven Digoel pada saat-saat itu tidak banyak memberikan dampak yang berarti, hanya menimbulkan ketakutan dan trauma yang panjang dalam masyarakat.

Wajah baru pemekaran kabupaten Boven Digoel banyak memberikan perubahan, dari yang tidak ada menjadi ada. Masyarakat di Boven Digoel yang tidak pernah merasakan berada di pusat kota kabupaten kini dapat menikmatinya. Arus informasi, sarana-sarana baru komunikasi dan transportasi yang tersedia telah membuka ruang keterisolasian daerah yang tadinya tidak tersentuh oleh pemerintah. Luasnya wilayah kabupaten Merauke pada saat itu, sehingga banyak masyarakat hidup berkelompok-kelompok yang jauh dari sentuhan pemerintah. Masyarakat tidak pernah merasa berada dekat dengan pusat pemerintahan, akses ekonomi, pendidikan dan lapangan pekerjaan semakin terbuka. pemekaran kabupaten Boven Digoel pada intinya mendekatkan pelayanan. Juga pemekaran kabupaten Boven Digoel dapat dimaknai sebagai penghargaan terhadap nilai-nilai identitas lokal etnis-etnis yang mendiami wilayah tersebut.

Perjuangan bersama masyarakat, baik masyarakat Muyu dan Wambon yang berdomisili di kabupaten Merauke maupun yang ada di Boven Digoel. Elit-elit lokal yang mengambil peran yang dominan dalam suksesi pemekaran kabupaten Boven Digoel. Rentang kendali dan jarak tempuh pelayanan pemerintah sudah semakin dekat dengan

Rivalitas Politik: Politisasi Etnis dalam Pilkada Boven Digoel

masyarakat. Perubahan paradigma dari Boven Digoel sebagai daerah terisolir dan atau daerah perbatasan, telah menjadi halaman depan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemekaran telah membuktikan kehadiran pemerintah pusat ke daerah, tidak lagi menjadi halaman belakang sehingga dengan mudah saja terlupakan. Kehadiran pemerintah pusat ke daerah memberikan dampak terhadap perubahan-perubahan dalam pembangunan.

Pemekaran kabupaten Boven Digoel semakin membuka luas peluang, sementara ketersediaan sumber manusia Papua yang ada tidak dipergunakan semaksimal mungkin. Misalnya dalam rekrutmen CPNS, pengisian jabatan-jabatan birokrat, sumber-sumber ekonomi (proyek-proyek pemda) dikuasai oleh pihak lain. Terjadi arus urbanisasi penduduk dari daerah lain sehingga membuat masyarakat setempat lambat laun menjadi termarjinalkan. Fenomena yang sedang terjadi di Kabupaten Boven Digoel telah menimbulkan konflik horizontal di antara etnis Muyu dengan etnis Wambon karena elit-elit lokal dari kedua etnis tersebut disibukkan dengan perebutan kue kekuasaan yang ada. Kesadaran masyarakat terhadap arus perubahan pembangunan yang terjadi membuat persaingan-persaingan semakin ketat. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan pemekaran Boven Digoel telah menghadirkan banyak kelompok-kelompok lain yang kemudian turut memainkan peran dalam penguasaan sumber-sumber daya yang ada.

Dinamika yang terjadi pasca pemekaran kabupaten Boven Digoel telah melahirkan beragam persepsi, terlepas dari berbagai kepentingan para elit, baik elit Muyu dan Wambon. Niat awal pemekaran tidak ada tendensi untuk memecah-belah suku-suku yang ada, tetapi komitmen yang dibangun adalah untuk melayani masyarakat. Kesiapan sumber daya yang tersedia baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah. Fenomena yang terjadi adalah perebutan sumber-sumber kekuasaan oleh elit-elit lokal tak terelakan. Potensi kelompok-kelompok etnis tidak dikelola untuk mendukung proses pembangunan, tetapi dimobilisasi demi kepentingan elit-elit lokal, sehingga menimbulkan sentimen etnis. Masyarakat disibukkan dengan hal-hal yang bersifat politis, sementara sektor ekonomi, sosial budaya terabaikan, sehingga pasar yang merupakan barometer ekonomi dikuasai oleh kelompok-kelompok non Papua.

3.1.1. Rivalitas Etnis

Pemekaran daerah yang sedang terjadi bukanlah sesuatu yang final, di mana dapat menyelesaikan semua persoalan di daerah. Euforia pemekaran yang terjadi di Indonesia membuat pemerintah kehilangan kendali. Sebab gagasan pemekaran daerah dalam perjalannya tak lepas dari fenomena-fenomena konflik sosial dengan aktor konflik yaitu masyarakat, negara dan tak terkecuali para elit. Fenomena yang tak jarang terjadi adalah konflik tentang batas wilayah, perebutan sumber daya alam, penentuan ibu kota kabupaten/provinsi, serta kontestasi elit lokal dalam perebutan kekuasaan baik ekonomi maupun politik. Beberapa aspek penting yang terjadi menjadi realita, dimana dalam perjalanan pemekaran Kabupaten Boven Digoel tidak terlepas dari cerminan tersebut.

Pemekaran kabupaten Boven Digoel, dalam perjalannya, telah mengubah peta hubungan etnis Muyu dan Wambon. Implikasi pemekaran Boven Digoel menjadi pemicu rivalitas etnis antara Muyu dan Wambon. Jika disimak dengan cermat bentuk-bentuk persaingan perebutan kekuasaan dan persaingan identitas yang terlihat antara elit-elit Muyu dan Wambon dimulai dari sejak awal pemekaran; *pertama*, persaingan dalam penentuan ibu kota kabupaten Boven Digoel, elit-elit Muyu menghendaki ibu kota kabupaten di Mindiptana. Sementara elit-elit Wambon menghendaki sebaliknya, ibu kota kabupaten lebih tepat berada di Tanah Merah (sekarang ibu kota kabupaten). Tentunya dengan pertimbangan masing-masing. *Kedua*, persaingan dalam rekrutmen pejabat *carataker*, sekda serta pejabat-pejabat dalam struktur birokrasi. *Ketiga*, persaingan perebutan jabatan Ketua DPRD kabupaten Boven Digoel periode 2004-2009, dan, *keempat*, persaingan perebutan jabatan bupati dan wakil bupati kabupaten Boven Digoel tahun 2005 dan 2010 bernuansa persaingan etnis.

Rivalitas Politik: Politisasi Etnis dalam Pilkada Boven Digoel

Pemekaran bernuansa etnis yang terjadi di selatan Papua berimplikasi pada rivalitas antar etnis-ethnis lokal. Penempatan birokrat di pemerintah kabupaten Boven Digoel pada awal-awal pemekaran banyak didominasi oleh elit Muyu. Pada saat yang bersamaan elit-elit Wambon mulai mengampanyekan isu “ini tanah Wambon” jadi seharusnya etnis Wambon yang menduduki posisi-posisi penting dalam jajaran birokrat, termasuk menjabat pimpinan daerah. Ketika elit-elit Wambon yang ditandai dengan terpilihnya Yusak Yaluwo sebagai bupati kabupaten Boven Digoel, ada kebangkitan etnis Wambon. Banyak elit-elit Wambon yang menduduki struktur birokrasi di Kabupaten Boven Digoel.

Tidak hanya rivalitas terjadi antar etnis lokal, tetapi juga antar etnis-ethnis non Papua. Jauh sebelum pemekaran etnis-ethnis non Papua telah lama juga hadir di Boven Digoel, sistem pasar semi modern. Sehingga ketika pemekaran telah melahirkan persaingan pasar, etnis-ethnis lokal dengan sistem pasar tradisional dan etnis non Papua dengan sistem pasar modern. Di dalam pasar tradisional juga etnis Muyu dan Wambon harus bersaing dengan etnis Jawa yang berasal dari kampung eks trans (Muting). Persaingan antar kontraktor-kontraktor lokal dengan kontraktor non Papua dalam perebutan proyek-proyek APBD maupun APBN. Ada kecenderungan kedekatan kontraktor non Papua dengan para birokrat, sehingga dengan mudah mendapatkan proyek-proyek yang berskala besar, sehingga ada kecemburuan dari kontarktor-kontraktor lokal. Sementara kontraktor-kontraktor lokal hanya bisa bersaing pada proyek-proyek yang nilai kontraknya kecil.

Tidak hanya rivalitas terjadi dalam perebutan sumber-sumber kekuasaan, tetapi identitas etnis menjadi taruhan dalam persaingan tersebut untuk saling menunjukkan superioritas etnis. Peristiwa-peristiwa dan sikap yang pernah terjadi sebelum pemekaran antar elit-elit Muyu dan Wambon menjadi ingatan sosial yang kemudian dihadirkan pada saat pemekaran daerah. Asumsi etnis Wambon tentang ketidakadilan etnis Muyu muncul sebagai ingatan sosial, dengan tujuannya membangun loyalitas etnis dalam etnis Wambon. Sentimen etnis ini kemudian diterjemahkan sebagai kekuatan politik dalam perebutan kekuasaan sekaligus menimbulkan kebencian terhadap etnis Muyu. Artinya rivalitas tidak akan terjadi pada ruang-ruang yang kosong atau di mana tidak ada arena yang diperebutkan oleh kedua belah pihak. Ada waktu, ruang dan kepentingan yang berbeda, artinya *statement-statement* elit Muyu pada saat sebelum pemekaran dianggap biasa saja, tetapi ketika terjadi pada saat pemekaran daerah, yang mana ruang-ruang kontestasi perebutan sumber-sumber kekuasaan sedang terbuka lebar maka *statement* tersebut dijadikan sebuah isu politik oleh elit-elit lokal.

Tidak hanya sumber-sumber kekuasaan yang menjadi ajang persaingan, tetapi identitas etnis menjadi taruhan dalam persaingan tersebut, yang berujung pada etnis mana yang paling superior, sehingga rasa antipati, ketidakpercayaan dan saling menjaga jarak dalam komunikasi sosial antar etnis satu dengan yang lain semakin mengkristal. Sikap dan perilaku seperti ini terlihat dalam relasi antar etnis Muyu dan Wambon juga dalam relasi sosial mengalami keretakan. Dinamika tersebut tidak hanya terjadi di kabupaten Boven Digoel, hampir terjadi juga di luar Kabupaten Boven Digoel, dimana kedua etnis ini berada. Sikap dan tingkah laku yang demikian mencapai klimaksnya jika ada momen-momen dimana menghadirkan kedua etnis tersebut ke ruang-ruang kontestasi seperti yang pemilihan kepala daerah.

3.2. Model Politisasi Etnis

3.2.1 Isu – Isu yang digunakan

Dinamika politisasi etnis yang terjadi di kabupaten Boven Digoel adalah kelompok-kelompok etnis baik, Muyu maupun Wambon dijadikan sebagai komoditas politik untuk kepentingan elit-elit lokal. Pada umumnya bentuk-bentuk politisasi etnis yang dilakukan oleh elit-elit Muyu dan Wambon beragam bentuk. Selain isu-isu etnis menjadi parameter, juga elit-elit lokal menggunakan lembaga adat sebagai sarana dalam perebutan kekuasaan di kabupaten Boven Digoel.

Etnis merupakan energi positif dalam perebutan kekuasaan, maka dengan mudah kelompok-kelompok etnis dimobilisasi demi kepentingan para elit. Dominasi etnis Muyu dan ketidakmampuan etnis Wambon menjadi isu sentral yang digunakan oleh elit-elit

Rivalitas Politik: Politisasi Etnis dalam Pilkada Boven Digoel

Muyu maupun elit Wambon dalam mendulang dukungan-dukungan politik pada kelompok-kelompok berbasis etnis. Sentimen dan loyalitas etnis Wambon menjadi energi positif yang dikelola dengan baik oleh elit-elitnya dalam perebutan kekuasaan di kabupaten Boven Digoel. Mobilisasi etnis dalam gerakan Wambon bersatu (Wambers), digunakan sebagai gerakan politik. Sementara hegemoni yang ditampilkan oleh elit-elit Muyu dengan menampilkan diri sebagai *Kayapak*, dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki untuk mendapatkan pengakuan dari pihak lain. Dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliknya, kecenderungan menganggap pihak lain tidak memiliki kemampuan.

Pandangan-pandangan dari kedua etnis tentang “orang Wanbon itu pemalas dan bodoh sementara orang Muyu itu sompong, egois dan penjajah” telah lama terbangun. Pandangan atau *image* ini kemudian di-setting dengan baik oleh elit Muyu maupun elit Wambon dan dijadikan sebuah isu politik dalam perebutan kekuasaan. Isu-isu tersebut yang dikembangkan oleh elit-elit lokal telah menyasar ke kalangan intelektual dan mahasiswa, bahkan sampai di kampung-kampung. juga isu tersebut tidak hanya menjadi konsumsi untuk kedua etnis saja tetapi telah menyebar luar pada etnis-etnis lokal maupun non Papua yang ada di Boven Digoel. Secara psikologis, etnis Muyu dan Wambon lebih mudah terprovokasi atas isu-isu yang beredar sehingga dengan mudah masyarakat dimobilisasi oleh para elit (Nawir & Mukramin, 2019).

Banyak hal yang baik dilakukan oleh etnis Muyu terhadap etnis Wambon, tetapi ada pula perlakuan kurang baik yang dilakukan oleh etnis Muyu terhadap etnis Wambon, baik itu terjadi di daerah Wambon sendiri maupun di daerah Muyu. Perlakuan-perlakuan yang kurang etis ini tersimpan dalam memori etnis Wambon sebagai ingatan sosial dan selalu disampaikan lewat cerita dari generasi ke generasi. Sementara etnis Muyu selalu berasumsi bahwa kami lebih dahulu mengenal peradaban. Masuknya gereja Katolik telah membuka peradaban baru bagi etnis Muyu sehingga mereka mampu berkembang lebih awal. Sementara Pemerintah Belanda melarang Gereja katolik untuk tidak melakukan *evangelasi* (penyebaran Injil) di daerah Wambon, karena daerah ini dijadikan penjara hidup bagi para tahanan nasionalis Indonesia. Padangan ini turut mempengaruhi perkembangan kedua etnis sejak sekian tahun dalam kehidupan mereka.

Pembacaan kedua etnis Muyu dan Wambon dapat ditelusuri dalam cerita-cerita mitologi, yang membuktikan bahwa kedua etnis itu memiliki hubungan persaudaraan. Cerita-cerita tersebut sangat diyakini oleh kedua etnis tidak hanya sebagai sebuah cerita biasa saja tetapi cerita bermakna, dengan pesan yang disampaikan lewat simbol yaitu pesan tentang kehidupan. Dalam budaya kedua etnis tersebut meyakini simbol-simbol dan pesan-pesan yang diwahyukan dalam cerita mitos tersebut. Simbol-simbol itu berupa tokoh sentral, benda-benda, binatang, tumbuh-tumbuhan dan tempat-tempat *pemali* (keramat). Sedangkan pesan adalah sesuatu yang disampaikan oleh tokoh sentral tersebut tentang kehidupan, masa lalu, sekarang dan yang akan datang.

Mitologi tersebut mempunyai presepsi yang membentuk persaudaraan. Dibeberapa versi mengatakan bahwa etnis Muyu sebagai “kakak/ambang” dan etnis Wambon sebagai “adik/taman”, begitu pula sebaliknya. Sementara versi lain mengatakan etnis Muyu sebagai “paman/mom” dan etnis Wambon sebagai “keponakan/monggop”. Penyebutan ini ada keterkaitan dengan istilah “MUMAN (Muyu dan Mandobo/Wambon)”, sehingga tersebut mempunyai presepsi yang berbeda, karena dimaknai mengandung unsur superioritas dalam relasi kedua etnis.

Isu dominasi etnis Muyu di bidang ekonomi, sosial budaya dan politik serta keterbelakangan etnis Wambon. Juga isu tentang pengungsian ke PNG yang terjadi di wilayah Muyu pada tahun 1984-1985, sebelum pemekaran Boven Digoel dianggap sebagai permasalahan biasa. Tetapi ketika pemekaran terjadi, isu-isu tersebut dijadikan sebagai komoditas politik dalam perebutan kekuasaan. Distribusi kekuasaan paska pemekaran Kabupaten Boven Digoel menjadi pintu masuk bagi elit-elit lokal untuk memobilisasi kelompok-kelompok etnis dengan membangun sentimen etnis dan sikap primordial lewat isu-isu yang telah terjadi pada masa lampau. Bahkan ada ucapan-ucapan

Rivalitas Politik: Politisasi Etnis dalam Pilkada Boven Digoel

yang dipandang sebagai bentuk stigmatisasi juga kerapkali terjadi. Karena ada ruang, waktu dan kepentingan yang berbeda; sebelum pemekaran isu-isu dan peristiwa-peristiwa yang terjadi anat kedua etnis tersebut, dipandang biasa-biasa saja, tetapi ketika pemekaran terjadi hal itu dijadikan sebagai komoditas politik oleh elit-elit lokal. (Indrawan & Lutfi, 2021)

Tidak hanya sebatas isu-isu etnisitas, tetapi isu dominasi sumber-sumber ekonomi khususnya penggunaan APBD Kabupaten Boven Digoel juga turut menjadi isu yang dorong oleh elit-elit Wambon. Isu ini ada korelasi dengan penggunaan struktur birokrasi yang dimulai dari carataker dan juga beberapa pimpinan SKPD adalah etnis Muyu. Juga penggunaan proyek-proyek yang dibiayai dari APBD Boven Digoel disinyalir bernuansa etnisitas. Tetapi sesungguhnya juga bahwa pemekaran Kabupaten Boven Digoel tidak sepenuhnya murni dari aspirasi masyarakat kecil, tetapi lebih dominan kepentingan elit. Selain memperluas akses kekuasaan dalam struktur birokrasi dan politik, para pemilik modal atau pengusaha juga ingin memperluas jaringan ekonomi pada daerah otonom baru dengan target melirik proyek-proyek APBD maupun APBN.

Berbicara kabupaten Boven Digoel tidak lepas dari sejarah Republik Indonesia, yakni para nasionalis Indonesia yang pernah diasingkan oleh pemerintah Belanda, sebut saja Mohamad Hatta, Sutan Sjahrir dkk. Sisi lain ada sejarah kelam yang pernah terjadi pada tahun 1984-1985, yaitu peristiwa sekitar ± 6000 orang mengunci ke Papua New Gunea dari wilayah distrik Mindiptana dan Woropko. Peristiwa tersebut menjadi sorotan pemerintah pusat, yang berimplikasi pada daerah-daerah itu ditetapkan sebagai “daerah merah” dan dijadikan Daerah Operasi Militer (DOM). OPM sebagai basis perjuangan Papua merdeka dan gerakan SORANDA sebagai organ-organ perjuangan yang juga mendukung pergerakan Papua merdeka, disinyalir dipergunakan oleh elit lokal sebagai kekuatan politik. Dengan upaya pengkondisian opini untuk saling menjatuhkan di kalangan elit-elit lokal.

3.2.2 Sarana Yang digunakan

Isu-isu etnisitas dalam konteks politik lokal di Kabupaten Boven Digoel, *di-setting* oleh elit-elit lokal dan dikembangkan melalui sarana-sarana dengan targetnya adalah basis-basis dari masing-masing etnis. Semangat otonomi khusus telah memberikan inspirasi bagi terbentuknya Dewan Adat Papua (DAP). Selain lembaga kultur, DAP dalam pergerakannya sering terlibat dalam politik praktis. Lembaga adat menjadi tempat pembahasan politik praktis, bahkan kerap kali dijadikan mesin politik oleh elit-elit lokal dalam perebutan kekuasaan. Keterlibatan lembaga adat dalam politik praktis beraneka ragam, mulai seruan-seruan politik, statement-statement politik bahkan menjadi alat kampanye terselubung.

Secara hakikatnya bahwa dewan adat suku (DAS) Muyu dan Wambon merupakan representatif dari masing-masing etnis, dengan fungsinya yaitu mengawal nilai-nilai adat dari masing-masing etnis pula. Realita yang terjadi adalah DAS hadir sebagai kekuatan politik. Karena ikatan kolektivitas dan komunalistik yang kuat sehingga ada legitimasi etnis. Bentuk-bentuk politisasi DAS mulai terlihat dengan adanya pertemuan-pertemuan rutin yang dilakukan membahas isu-isu yang bernuasa etnisitas, harga diri, pelecehan, dominasi, diskriminasi, bahkan penyampaian-penyampaian pernyataan sikap. Terlepas dari niatnya untuk menemukan identitas diri dalam konteks budaya, tetapi pergantian nama Mandobo menjadi Wambon dalam struktur kelembagaan dewan adat disinyalir bernuansa politis. Karena ada korelasi dengan gerakan Wambon Bersatu (WAMBERS), gerakan tersebut dimobilisasi oleh DAS selain menyatukan sub-sub etnis Wambon mendorong isu-isu strategis.

Berbeda dengan Dewan adat suku (DAS) sebagai representasi dari etnis Muyu pada umumnya tidak banyak mengambil peran dalam arena politik praktis. Artinya lembaga ini tidak banyak berperan dalam pembicaraan masalah-masalah politik, baik dalam pertemuan-pertemuan biasa maupun rapat-rapat adat. Walaupun struktur kelembagaannya jelas, tetapi budaya budaya individualis masih mendominasi dan dalam budaya etnis Muyu

Rivalitas Politik: Politisasi Etnis dalam Pilkada Boven Digoel

tidak dikenal kepemimpinan tunggal seperti *Kayapak*. Simbol *Kayapak* (*big man*) ditampilkan oleh elit-elit Muyu dalam perebutan kekuasaan di kabupaten Boven Digoel. Dalam konteks itu keberhasilan dan kemampuan pribadi akan menjadi indikator dalam kampanye-kampanye politik. Kemampuan pribadi yang dimiliki merupakan cerminan dari seorang *Kayapak* sehingga kadang kala membuat elit-elit Muyu menjustis elit-elit lain khususnya elit-elit Wambon.

Pengisian jabatan pada struktur birokrasi pada awal pemekaran Boven Digoel yang didominasi oleh elit-elit Muyu, tidak dijadikan sebagai mesin politik dalam perebutan kekuasaan. Justeru menjadi isu yang digunakan oleh elit-elit Wambon dan Auwuyu, untuk mendeskreditkan elit-elit Muyu, karena ada kekawatiran akan terjadi dominasi. Sisi lain, harapan bahwa ada upaya kaderisasi terhadap etnis-ethnis lokal lainnya dalam menduduki posisi-posisi penting dalam struktur birokrasi. Harapan itu beralasan karena pengakuan etnis Wambon kepada etnis Muyu sebagai “*kakak*”, tetapi harapan itu tidak terjadi. Akumulasi-akumulasi kekecewaan itu menambah ketidakpercayaan elit-elit Wambon kepada elit-elit Muyu dalam memimpin di jajaran birokrat

5. Kesimpulan

Wajah baru pemekaran kabupaten Boven Digoel banyak memberikan perubahan, dari yang tidak ada menjadi ada. Masyarakat di Boven Digoel yang tidak pernah merasakan berada di pusat kota kabupaten kini dapat menikmatinya. Arus informasi, komunikasi dan transportasi yang tersedia telah membuka ruang keterisolasi daerah yang tadinya tidak tersentuh oleh pemerintah. Juga dapat dimaknai sebagai penghargaan terhadap nilai-nilai identitas lokal etnis-ethnis yang mendiami wilayah tersebut. Niat awal pemekaran tidak ada tendensi untuk memecah-belah suku-suku yang ada, tetapi komitmen yang dibangun adalah untuk melayani masyarakat. Kesiapan sumber daya yang tersedia baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah. Fenomena yang terjadi adalah perebutan sumber-sumber kekuasaan oleh elit-elit lokal tak terelakan. Potensi kelompok-kelompok etnis tidak dikelola untuk mendukung proses pembangunan, tetapi dimobilisasi demi kepentingan elit-elit lokal, sehingga menimbulkan sentimen etnis.

Pemekaran Kabupaten Boven Digoel telah menjadi arena perebutan kekuasaan, elit-elit lokal menggunakan simbol-simbol etnis sebagai kekuatan politik. Sentimen-sentimen etnis, ikatan-ikatan kolektivitas, primodial, ikatan komunalistik dan juga batas-batas teritorial serta hegemoni etnis sebagai kekuatan politik. Isu-isu yang dibangun bersifat kebencian terhadap elit-elit Muyu, misalnya dominasi, egoisme, bahkan tidak jarang yang elit-elit Muyu dijustifikan sebagai penjajah. Sementara elit-elit Muyu menggunakan simbol *kayapak* sebagai bentuk hegemoni dengan menjustifikasi ketidakmampuan etnis Wambon, sehingga ada semacam bentuk pengakuan yang diberikan oleh pihak lain kapadanya.

Proses-proses politisasi yang dilakukan oleh elit-elit Muyu maupun Wambon dalam perebutan kekuasaan meliputi dua hal, isu-isu dan sarana yang dipergunakan. Kebangkitan lembaga-lembaga adat juga menjadi peluang bagi elit-elit lokal untuk dijadikan sebagai mesin politik dalam arena perebutan kekuasaan. Realita yang terjadi di kabupaten Boven Digoel, dimana lembaga adat Wambon di pergunakan oleh elit-elitnya sebagai mesin politik untuk mendorong isu-isu sentimen dan primodial etnis. Berbeda dengan elit-elit Muyu, yang mana lembaga adat Muyu tidak dihadirkan sebagai mesin politik, karena di dalam etnis Muyu pada umumnya tidak terdapat budaya kolektivitas. Untuk mencapai tujuan-tujuannya, etnis Muyu nyaris tidak tergantung kepada, atau tidak harus memperhatikan anggota-anggota komunitasnya. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang nantinya dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat Boven Digoel pada umumnya, lebih khusus eli-elit lokal, yakni: Secara politik, harus ada pengakuan terhadap identitas antar etnis Muyu dan Wambon sebagai kompromi ataupun *bargaining position*, sehingga isu etnisitas dapat diminimalisir dalam perebutan kekuasaan. Rekonsiliasi etnis

Rivalitas Politik: Politisasi Etnis dalam Pilkada Boven Digoel

berbarengan dengan distribusi kekuasaan, sehingga menghindari stigmanisi dan dominasi antar etnis-ethnis lokal di Kabupaten Boven.

Rivalitas Politik: Politisasi Etnis dalam Pilkada Boven Digoel

Referensi

1. Adam, A. F., Jusuf, A. P., & Saragih, D. P. (2019). The power of identity and communal networks of Papua. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 343(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012209>
2. Ansori, M., & Iswanti, S. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Airlangga University Press.
3. Handoko, S. T. (2016). *BOVEN DIGOEL DALAM PANGGUNG SEJARAH INDONESIA: DARI PERGERAKAN NASIONAL HINGGA OTONOMI KHUSUS PAPUA*. 1(2).
4. Indrawan, J., & Lutfi, A. P. K. (2021). Pemetaan Konflik Identitas: Studi Kasus Etnis Samawa Dengan Etnis Bali Di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 11(2), 87. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v11i2.1257>
5. Muhtadi, B. (2018). Politik Identitas dan Mitos Pemilih Rasional. *Maarif*, 13(2), 68–86. <https://doi.org/10.47651/mrf.v13i2.23>
6. Nawir, M., & Mukramin, S. (2019). Identitas Etnis Dalam Ranah Politik. *Phinisi Integration Review*, 2(2), 348. <https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10090>
7. Pamungkas, C. (2014). Agama, Etnisitas, dan Perubahan Politik di Maluku: Refleksi Teoretik dan Historis. *Masyarakat Indonesia*, 40(1), 37–56.
8. Ronaldo, R., & Darmaiza, D. (2021). Politisasi Agama dan Politik Kebencian pada Pemilu Presiden Indonesia 2019. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 3(1), 33–48. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v3i1.150>
9. Simamora, S. D. V., & Rahardjo, T. (2019). Isu Identitas Etnis dan Agama Dalam Kontes Politik (Kasus Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018). *Interaksi Online*, 7(4), 317–329. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/24932>
10. Siregar, M. H., Nasution, M. A., & Warjio, W. (2021). Politisasi Agama pada Kampanye Pemenangan Eramas dalam Pilkada Sumatera Utara Tahun 2018. *Perspektif*, 11(1), 1–7. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.4727>
11. Snanf, F. L., Darwin, M., & Ikhwan, H. (2018). *POLITIK IDENTITAS ETNIK ASLI PAPUA BERKONTESTASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA SORONG*. 20(2), 122–131.
12. Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Administrasi* (23 ed.).